

MODEL TATA KELOLA PERSAMPAHAN DI METROPOLITAN BANJARBAKULA

WASTE MANAGEMENT GOVERNANCE MODEL IN THE BANJARBAKULA METROPOLITAN AREA

Muhammad Fajri Nugraha

Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan,
dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), Institut Teknologi Bandung
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan

Email: fajrinugraha2602@gmail.com

Diserahkan: 23/01/2026 Diperbaiki: 08/03/2026 Disetujui: 09/03/2026

DOI : 10.47441/jkp.v21i1.484

Abstrak

Ancaman dampak lingkungan yang ditimbulkan ketika persoalan pengelolaan persampahan di Metropolitan Banjarkakula tidak teratasi mendorong perlunya model tata kelola baru yang mampu mensinergikan kepentingan berbagai stakeholder yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk merekomendasikan model tata kelola alternatif dalam pengelolaan persampahan di Metropolitan Banjarkakula. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur dengan memanfaatkan dokumen kebijakan, data sekunder, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Network Administrative Organization* dapat dipilih sebagai model tata kelola baru dalam pengelolaan persampahan di Metropolitan Banjarkakula. Tata kelola tersebut dilaksanakan melalui pembentukan Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Banjarkakula selaku lembaga khusus yang akan berperan mengelola dan mengoordinatori interaksi antar pemerintah daerah dalam pengelolaan persampahan di Metropolitan Banjarkakula. Selain itu, hubungan antarpemerintah daerah tersebut akan dijalin dalam sebuah kerja sama antardaerah yang secara spesifik akan mengatur komitmen alokasi anggaran, *tipping fee* pengelolaan sampah, aturan retribusi, mekanisme evaluasi dan pelaporan kinerja, serta pemberian *reward & punishment* bagi kabupaten/kota.

Kata Kunci: *Network Administrative Organization*, Metropolitan Banjarkakula, Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Banjarkakula, Kerja Sama Antardaerah

Abstract

The environmental threats posed by unresolved waste management issues in the Banjarkakula Metropolitan Area necessitate a new governance model capable of aligning the interests of diverse stakeholders. This study aims to propose an alternative governance framework for waste management within the region. Adopting a qualitative approach, the research utilizes a literature review to examine policy documents, secondary data, and relevant academic literature. The results indicate that a Network Administrative Organization (NAO) is a suitable governance model for waste management in the Banjarkakula Metropolitan Area. This model is operationalized through the establishment of the Banjarkakula Metropolitan Area Management Agency, an institution designed to play a central role in coordinating waste management interactions among local governments. Furthermore, this framework facilitates inter-regional collaboration to specifically regulate budget allocation commitments, tipping fees, retribution (user fee) regulations, performance evaluation mechanisms, and the provision of rewards and punishments for participating regencies and cities.

Keywords: *Network Administrative Organization, Banjarbakula Metropolitan Area, Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Banjarbakula, Inter-regional Cooperation*

PENDAHULUAN

Dalam catatan global, produksi timbulan sampah perkotaan terus mengalami tren peningkatan yang cukup mengkhawatirkan. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa akan ada 3,4 miliar ton sampah per tahun pada tahun 2050 (Abubakar *et al.* 2022). Hal tersebut juga menjadi tantangan serius bagi Indonesia, dimana pengelolaan sampah menjadi isu yang mendesak, karena mengingat posisi Indonesia sebagai salah satu kontributor sampah plastik laut terbesar di dunia (Valentina *et al.* 2025). Persoalan tersebut dapat dilihat secara nyata pada konteks metropolitan yang mengalami perkembangan urbanisasi yang pesat, menyebabkan produksi volume sampah terus mengalami peningkatan dan seringkali melampaui kapasitas sistem pengelolaan sampah yang ada (Valentina *et al.* 2025). Kondisi ini semakin diperparah dengan keterbatasan kapasitas dan kualitas infrastruktur pengelolaan sampah, seperti minimnya kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) dan ketersediaan teknologi pengolahan sampah yang pada akhirnya dapat memicu pencemaran lingkungan (Valentina *et al.* 2025).

Provinsi Kalimantan Selatan menghadapi tantangan yang serupa. Kawasan Metropolitan Banjarbakula yang terdiri dari Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan pusat kegiatan ekonomi berskala internasional melalui aktivitas perdagangan dan jasa, pariwisata, industri, kelautan, dan pertanian (Kementerian Sekretariat Negara, n.d.). Hal ini menjelaskan bahwa pengembangan kawasan metropolitan ini ditujukan untuk mewadahi pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya laut dan sumber daya darat di Pulau Kalimantan. Seiring dengan pengembangan kawasan yang terintegrasi, persoalan sampah tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan domestik masing-masing daerah karena terbatasnya sumber daya dan mahalnya biaya operasional (Vardopoulos *et al.* 2021). Apalagi mengingat total jumlah penduduk di Metropolitan Banjarbakula ini mencapai 52% dari total populasi Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga pemerintah perlu menginisiasi kebijakan pembangunan TPA Regional Banjarbakula yang diharapkan dapat menjadi solusi terintegrasi penanganan sampah dan mendorong terbentuknya kerja sama antardaerah (Irawanto 2019).

Namun, tata kelola persampahan di Banjarbakula masih mengalami hambatan terkait ego sektoral, lemahnya koordinasi dalam pembagian peran, serta persoalan pembiayaan operasional (Irawanto 2019). Hal ini ditunjukkan dengan minimnya ketersediaan alat untuk mengolah sampah di TPA Regional Banjarbakula, yang saat ini sudah menerima sampah masuk berkisar 350-360 ton per hari dengan rincian Banjarmasin menyumbang sekitar 200 ton, Banjarbaru 80 ton, Banjar 60 ton, Tanah Laut 10 ton, dan Barito Kuala 10 ton (LPPL Abdi Persada 2025). Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan selaku pengelola TPA Regional Banjarbakula tersebut mengkhawatirkan terjadinya *overcapacity* di TPA Regional Banjarbakula akibat volume sampah yang melebihi ketentuan yang telah disepakati (KalimantanPost.com 2025). Maylana *et al.* (2024) dalam penelitiannya menyampaikan bahwa dengan kondisi yang sekarang, diprediksi kalau kapasitas TPA Regional Banjarbakula sebesar 372.393 ton akan mencapai batas maksimal pada September 2028 dan pengelolaan sampah berisiko menjadi tidak optimal.

Kompleksnya persoalan tersebut mengindikasikan adanya ketidakefektifan pengelolaan persampahan yang seringkali berakar pada isu tata kelola, dimana ada kesenjangan koordinasi dalam sistem pemerintahan multi-level (Jones 2020). Maylana *et al.* (2024) dalam penelitiannya menyampaikan bahwa tata kelola yang perlu ditingkatkan dalam pengelolaan persampahan di Metropolitan Banjarbakula meliputi kelembagaan dan SDM pengelola, kepatuhan terhadap regulasi, peningkatan partisipasi masyarakat, dan

peningkatan aspek teknis operasional. Selain itu, lemahnya konsistensi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta minimnya partisipasi sektor swasta, menyebabkan upaya penanganan persampahan sering kali tidak berkelanjutan (Song *et al.* 2025; Jones 2020). Belum adanya kerangka kebijakan yang secara eksplisit mengatur hubungan koordinasi lintas sektoral menjadi hambatan dalam koordinasi lintas level (Pahl-Wostl 2019), sehingga tanpa adanya model tata kelola yang mampu mensinergikan kepentingan berbagai aktor, ancaman inefisiensi dan konflik kepentingan sangat mungkin terjadi (Irawanto 2019).

Inovasi dalam tata kelola perkotaan yang menekankan pada interaksi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangatlah diperlukan. Pengalaman di Bali dan Bandung menunjukkan bahwa pengelolaan sampah akan sangat bergantung pada kemampuan membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan kepemimpinan yang fasilitatif (Ain *et al.* 2021; Rini, Sufianti, and Abdullah 2021). Selain itu, kemampuan menyeimbangkan dinamika politik dan proses teknokratis juga menjadi faktor penentu dalam keberlanjutan siklus tata kelola tersebut (Ulibarri and Scott 2017; da Cruz, Rode, and McQuarrie 2019).

Beberapa penelitian telah dilakukan oleh Abrain (2018), Irawanto (2019), dan Maylana *et al.* (2024) lebih banyak mengulas konteks kerja sama antarkabupaten/kota di Metropolitan Banjarbakula dan membahas teknis operasional TPA Regional Banjarbakula. Belum ada penelitian yang secara spesifik menganalisis dan merekomendasikan model tata kelola yang bisa diaplikasikan dalam pengelolaan persampahan pada kawasan tersebut. Mengingat kompleksitas persoalan pengelolaan persampahan di Metropolitan Banjarbakula dan risiko dampak lingkungan yang mengancam apabila persoalan persampahan tersebut tidak dapat tertangani dengan maksimal, maka perlu ada rumusan terhadap model tata kelola persampahan yang relevan untuk diimplementasikan di Metropolitan Banjarbakula. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis model tata kelola yang relevan untuk dijalankan dalam pengelolaan persampahan di Metropolitan Banjarbakula.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur untuk menganalisis model tata kelola persampahan di Metropolitan Banjarbakula. Kajian literatur sendiri merupakan proses analisis yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan praktis berdasarkan literatur terkini tentang subjek tertentu melalui proses yang sistematis (Yam 2024). Kajian ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang meliputi (1) artikel ilmiah dan buku yang berkaitan dengan *collaborative governance*, kerja sama antardaerah, pengelolaan persampahan, dan teknis operasional TPA Regional Banjarbakula, (2) dokumen peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut, serta (3) berbagai sumber informasi lainnya yang relevan dengan konteks pengelolaan persampahan di Metropolitan Banjarbakula. Kajian ini disusun menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu identifikasi model kelembagaan eksisting dalam pengelolaan Metropolitan Banjarbakula, analisis rekomendasi model tata kelola persampahan di Metropolitan Banjarbakula, dan analisis pembentukan Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Banjarbakula.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Model Kelembagaan Eksisting dalam Pengelolaan Metropolitan Banjarbakula

Model pengelolaan Kawasan Metropolitan Banjarbakula menurut amanat Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2024 merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan pemerintah kabupaten/kota yang terkait. Gubernur Kalimantan Selatan diberikan wewenang sebagai koordinator utama pengelolaan Metropolitan Banjarbakula dan wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan kepada Menteri ATR/BPN secara berkala tiap 6 bulan. Sehingga dapat diketahui bahwa pengelolaan Kawasan Metropolitan Banjarbakula dilakukan dengan sistem kolaborasi multi-sektor dan multi-level yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk layanan publik yang bersifat lintas batas, pengelolaan diserahkan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Selatan atau instansi vertikal kementerian.

Pengelolaan persampahan di Metropolitan Banjarbakula dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) TPA Sampah Regional Banjarbakula. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur No. 156 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah TPA Sampah Regional Banjarbakula pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan pada 27 Desember 2017. UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula tersebut memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Lingkungan hidup di bidang pengelolaan operasional pemrosesan akhir sampah secara terpadu dan terintegrasi lintas kabupaten/kota. UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula bertugas untuk menerima kiriman sampah residu dari 5 (lima) daerah di Kawasan Metropolitan Banjarbakula. Hubungan kerja sama yang dikelola oleh UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula adalah Dinas Lingkungan Hidup dari masing-masing kabupaten/kota yang mengangkut sampah menggunakan truk menuju TPA regional di Kota Banjarbaru, lalu dilakukan penimbangan di jembatan timbang pada pintu masuk, lalu dikelola dengan menggunakan *sistem sanitary landfill*. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan retribusi pelayanan kepada masing-masing kabupaten/kota berdasarkan tonase sampah yang dibuang. Besaran retribusi diatur dalam Peraturan Daerah Kalimantan Selatan No. 4 Tahun 2018.

Model tata kelola eksisting pada Metropolitan Banjarbakula tidak terlepas dari persoalan kompleks. Ada beberapa persoalan dalam pengelolaan Metropolitan Banjarbakula secara umum maupun secara spesifik dalam konteks pengelolaan persampahan, antara lain:

1. Keterbatasan status kelembagaan pengelola
Saat ini, TPA Regional Banjarbakula yang dikelola oleh UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan memiliki keterbatasan dalam hal fleksibilitas pengelolaan keuangan karena sangat bergantung pada mekanisme APBD. Sehingga ketika sampah kian menumpuk di TPA dan alat pendukung pengolahan sampah kurang (LPPL Abdi Persada 2025), maka proses pengolahan sampah menjadi lebih lambat
2. Rendahnya rasa memiliki daerah
Inisiatif pembentukan model kelembagaan yang didominasi oleh pemerintah pusat dan provinsi, menyebabkan pemerintah daerah cenderung pasif. Hal ini dikhawatirkan dapat memunculkan perilaku *free rider* atau kondisi ketika daerah menikmati manfaat suatu barang atau layanan tanpa berkontribusi dan berpartisipasi dalam usaha penyediaan dan pengelolannya. Dalam konteks persampahan misalnya, pemerintah kabupaten/kota hanya fokus membuang sampah ke TPA regional, tapi mereka lalai dalam melakukan upaya pengurangan persampahan dari

tingkat hulu, yaitu sumber sampah. Selain itu, menurut Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, diketahui bahwasannya sampah yang dikirim ke TPA Regional Banjarbakula masih banyak yang bukan sampah residu, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya umur pakai TPA. Kondisi telah diprediksi dalam penelitian yang dilakukan oleh Maylana dkk yang menyampaikan bahwa sisa umur pakai TPA Regional Banjarbakula hanya sampai di tahun 2028, apabila tidak ada perubahan kondisi pengelolaan persampahan yang ada (Maylana *et al.* 2024).

3. Pengelolaan sampah yang belum optimal

Dalam dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, pengelolaan sampah yang belum optimal menjadi salah satu isu prioritas yang mendapat perhatian. Hal tersebut disebabkan karena besaran produksi sampah harian di tiap kabupaten/kota terus bertambah seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang pesat. Sebesar 17,92% atau 144.039 ton sampah yang dihasilkan adalah sampah plastik dengan dominasi sumber timbulan dari aktivitas rumah tangga sebesar 53,2%.

Usulan Model Tata Kelola Persampahan di Metropolitan Banjarbakula

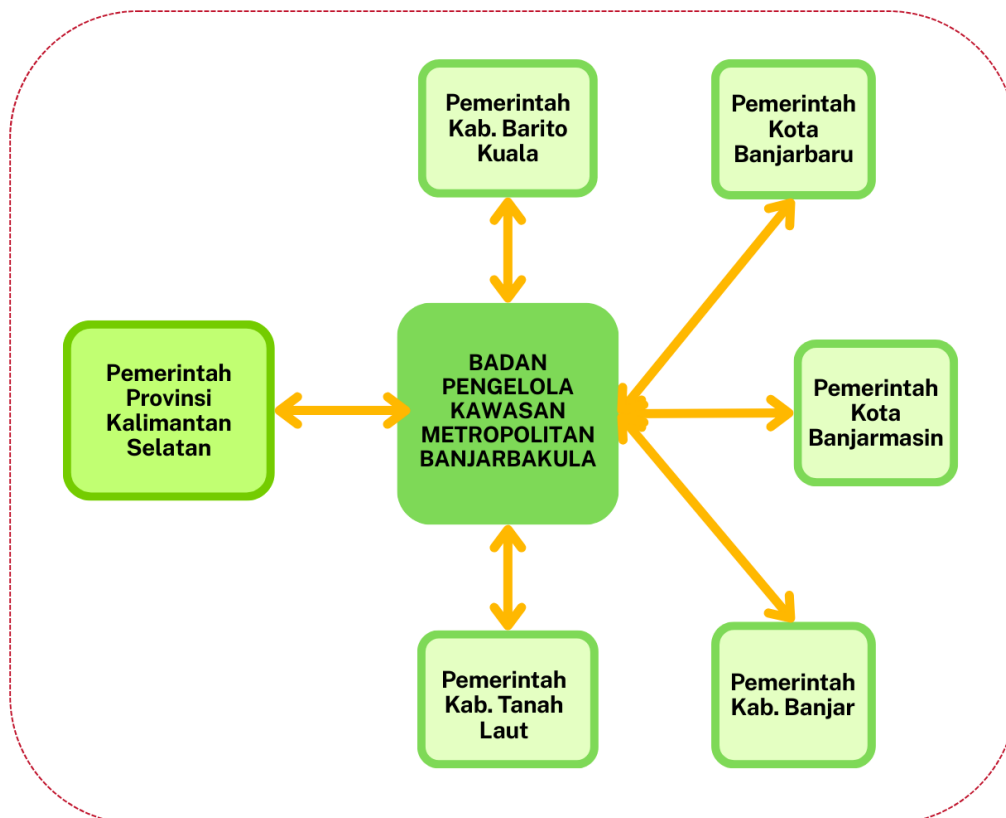
Pengelolaan persampahan di Metropolitan Banjarbakula melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kota Banjarmasin, Pemerintah Kota Banjarbaru, Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Oleh karena itu, model tata kelola yang direkomendasikan adalah *Network Administrative Organization*. Provan dan Kenis dalam artikel menjelaskan kalau Model *Network Administrative Organization* memiliki ciri utama yaitu (1) dibentuk lembaga khusus untuk mengelola jaringan, (2) NAO bersifat netral dan tidak menjalankan layanan utama, (3) fokus pada koordinasi, fasilitasi, dan monitoring (Provan and Kenis 2008). Kelebihan model ini menurut Provan dan Kenis adalah koordinasi yang dijalankan profesional dan berkelanjutan, dapat mengurangi konflik kepentingan, serta cocok untuk jaringan besar dan jangka panjang. Dari ciri-ciri dan kelebihan tersebut dihasilkan analisa pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Identifikasi Kesesuaian Penerapan Network Administrative Organization

No	Key Features	Kondisi Eksisting	Rekomendasi
1	Dibentuk lembaga khusus untuk mengelola jaringan	Belum ada lembaga khusus yang mengelola kolaborasi	Perlu dibentuk lembaga khusus yang mengelola kolaborasi pengelolaan
2	Koordinasi yang dijalankan profesional dan berkelanjutan	Kolaborasi saat ini dikoordinatori oleh gubernur dan ada kerentanan terhadap dinamika politik yang dapat mengganggu stabilitas kolaborasi	Tugas mengelola dan mengkoordinasikan kolaborasi perlu digeser kepada lembaga khusus yang diisi oleh para profesional
3	Cocok untuk keanggotan besar	Kolaborasi di Metropolitan Banjarbakula saat ini melibatkan 5 kabupaten dan kota	Keanggotaan yang besar, wilayah yang harus ditangani cukup luas, dan penduduk yang harus dilayani sangat banyak sehingga membutuhkan lembaga khusus untuk menjadi fasilitator dan pengelola yang sifatnya netral

Sumber: Olahan Penulis, 2025

Model *Network Administrative Organization* secara fundamental berdampak positif terhadap tata kelola jaringan antar-daerah, yaitu membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan strategi baru dalam menangani persoalan kompleks, mengatasi dilema aksi kolektif, mengatur distribusi sumber daya strategis, menciptakan sinergitas tujuan organisasi lokal dengan tujuan jaringan yang lebih luas, meminimalisir perilaku *free riding* aktor-aktor yang terlibat, membantu penetapan prioritas kebijakan, menjaga stabilitas hubungan tata kelola, mendorong efektivitas dan efisiensi pengelolaan, serta memfasilitasi inovasi dan pengembangan kapasitas pemerintah daerah (Klijn *et al.* 2017; Gjaltema, Biesbroek, and Termeer 2020; Wang and Ran 2023; Liu and Tan 2023; Nguyen Long and Krause 2021). Gambaran detail pengelolaan persampahan di Metropolitan Banjarbakula dengan menggunakan model *Network Administrative Organization* dapat dilihat pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Usulan Skema Tata Kelola Persampahan di Metropolitan Banjarbakula

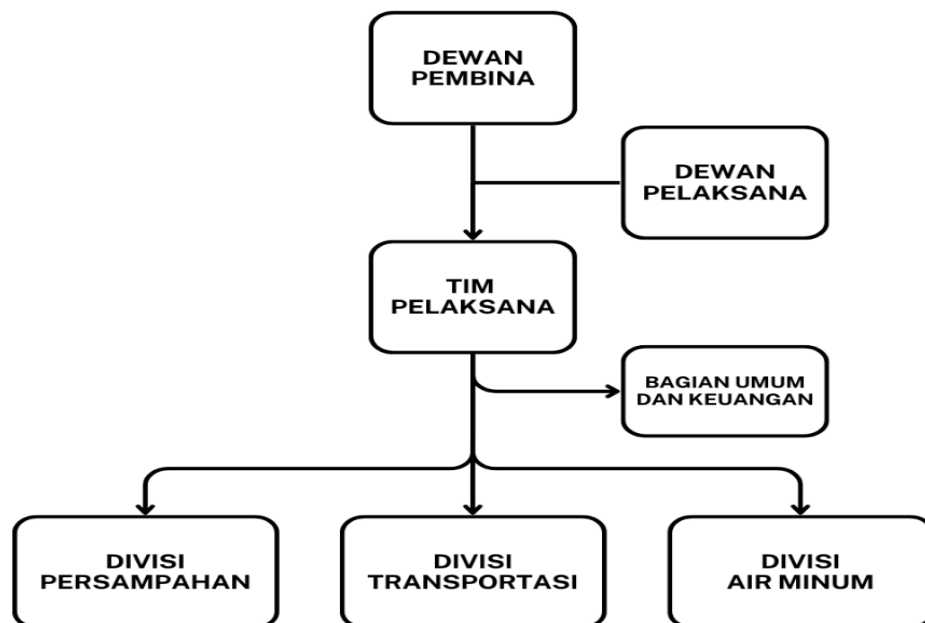
Sumber: Olahan penulis

Gambar 1 menunjukkan bahwa peran masing-masing aktor dalam tata kelola persampahan di Metropolitan Banjarbakula. Pemerintah Provinsi Kalimantan melalui Dinas Lingkungan Hidup berperan selaku pengelola dan operator Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Banjarbakula, sedangkan masing-masing pemerintah kabupaten/kota berperan selaku pengelola dan operator persampahan dari tingkat rumah tangga, pemilahan dan TPS 3R, dan pengangkutan akhir sampah ke TPA. Hubungan antar aktor dalam pengelolaan persampahan tersebut akan dikelola dan dikoordinatori oleh Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Banjarbakula yang merupakan sebuah lembaga baru dan secara khusus bertugas mengelola hubungan kelembagaan di Metropolitan Banjarbakula.

Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Banjarbakula

Dalam usulan model tata kelola *Network Administrative Organization*, akan dibentuk suatu lembaga khusus yaitu Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Banjarbakula yang berperan mengelola dan mengoordinatori kolaborasi antar stakeholder dalam pengelolaan persampahan di Metropolitan Banjarbakula. Pembentukan lembaga khusus ini mempedomani pendapat Di Gregorio *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa untuk mengatasi ketidaksesuaian antara struktur pemerintah berbasis yurisdiksi dengan masalah lingkungan yang berskala luas, maka diperlukan pengembangan institusi baru yang memiliki fungsi lintas level, dimana institusi tersebut harus mampu menjembatani hambatan komunikasi yang seringkali terjadi karena batas administratif wilayah. Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Banjarbakula dibentuk dengan landasan hukum berupa peraturan daerah ataupun peraturan gubernur yang di dalamnya mengatur tugas dan fungsi dan lembaga tersebut. Landasan hukum tersebut akan mempertegas posisi Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Banjarbakula dalam menjalankan perannya, sebagaimana Saz-Carranza, Iborra, and Albareda (2015) sampaikan dalam penelitiannya bahwasannya desain kelembagaan dari *Network Administrative Organization* harus mempertimbangkan siapa yang memiliki kontrol dan pengaruh terhadap lembaga *Network Administrative Organization*, seberapa besar ukuran lembaga *Network Administrative Organization*, dan bagaimana tugas *Network Administrative Organization* pada kolaborasi jaringan tersebut.

Struktur organisasi Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Banjarbakula akan menempatkan para kepala daerah (Gubernur Kalimantan Selatan, Walikota Banjarmasin, Walikota Banjarbaru, Bupati Banjar, Bupati Barito Kuala, dan Bupati Tanah Laut sebagai dewan pembina, kemudian para Sekretaris Daerah (Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan dan sekretaris daerah kabupaten/kota selaku dewan pelaksana. Badan ini akan dilengkapi dengan tim pelaksana yang akan diketahui dan diisi oleh para tenaga ahli di berbagai bidang sesuai dengan pembagian divisi kerja di Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Banjarbakula. Gambaran rancangan struktur organisasi Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Banjarbakula dapat dilihat pada **Gambar 2**.



Gambar 2. Rancangan Struktur Organisasi Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Banjarbakula

Sumber: Olahan penulis

Selain itu, Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Banjarbakula juga berperan untuk mendorong pembentukan kerja sama antar daerah yang melibatkan Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut. Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Banjarbakula selaku *Network Administrative Organization* harus memastikan bahwa kolaborasi yang terjalin di Metropolitan Banjarbakula harus inklusif, hal ini mempedomani pendapat Maron and Benish (2022) yang menyatakan bahwa inklusivitas dan keberagaman pendapat dalam kolaborasi dapat memperkuat efisiensi dan stabilitas kolaborasi secara jangka panjang.

Adapun lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Banjarbakula adalah:

1. Menyusun rencana aksi dan target pengelolaan infrastruktur
2. Menetapkan standar minimal pelayanan
3. Mengkoordinasikan skema pembiayaan bersama
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan
5. Mengelola kolaborasi secara berkala

Liu and Tan (2023) dalam artikelnya menyampaikan bahwa mekanisme utama yang harus dijalankan oleh sebuah *Network Administrative Organization* adalah koordinasi formal yang rutin untuk memperjelas tanggung jawab dan pembagian informasi, pengawasan kinerja guna memantau hasil pengelolaan secara berkelanjutan, serta menyediakan alokasi sumber daya dan tenaga ahli untuk mendukung implementasi kebijakan di tingkat lokal. Sehingga, model tata kelola ini diharuskan diperkuat dengan pembentukan kerja sama antar daerah yang melibatkan Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut. Kerja sama antardaerah dalam pengelolaan persampahan tersebut diatur dalam sebuah dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang memuat poin-poin kunci yang dapat memperjelas mekanisme tanggung jawab kolektif serta proses monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan persampahan, Adapun poin-poin kunci tersebut sebagai berikut:

1. Komitmen alokasi pengelolaan persampahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing pemerintah kabupaten/kota
2. Pemerintah kabupaten/kota harus menerapkan aturan biaya retribusi sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021
3. Pemerintah kabupaten/kota wajib membayar *tipping fee* sesuai berat tonase kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan selaku pengelola TPA Regional. *Tipping fee* tersebut juga memasukkan hitungan alokasi kompensasi eksternalitas negatif kepada Kota Banjarbaru terkait keberadaan TPA di wilayahnya
4. Jenis sampah yang diperbolehkan masuk ke tempat pembuangan akhir hanya jenis sampah residu dengan batasan tonase per hari
5. Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Banjarbakula akan melakukan evaluasi secara berkala setiap 3 bulan sekali bersama dengan kabupaten/kota terkait kinerja pengelolaan persampahan di Metropolitan Banjarbakula
6. Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Banjarbakula akan melaporkan kinerja pengelolaan persampahan di Metropolitan Banjarbakula setiap tahunnya dan akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan pemerintah pusat. Laporan tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja, target kinerja, serta pemberian reward & punishment bagi kabupaten/kota dengan kinerja terbaik dan terburuk
7. Gubernur Kalimantan Selatan akan menindaklanjuti laporan dari Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Banjarbakula terkait kinerja pengelolaan persampahan di Metropolitan Banjarbakula dengan sistem penghargaan dan hukuman (*reward &*

punishment) sesuai dengan kesepakatan bersama bagi kabupaten/kota dengan kinerja terbaik dan terburuk.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

SIMPULAN

Network Administrative Organization menjadi rekomendasi pengembangan model tata kelola persampahan di Metropolitan Banjarbakula. Hal ini untuk merespon persoalan kelembagaan yang terjadi dalam pengelolaan Metropolitan Banjarbakula yang berkaitan erat dengan status kelembagaan pengelola eksisting, rasa kepemilikan daerah terhadap program pengelolaan infrastruktur, dan teknis operasional pengelolaan persampahan. Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Banjarbakula sebagai perwujudan dari *Network Administrative Organization* direncanakan untuk berperan mengelola dan mengoordinatori kolaborasi antar-*stakeholder* dalam pengelolaan persampahan di Metropolitan Banjarbakula. Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Banjarbakula juga berperan untuk mendorong pembentukan kerja sama antardaerah antara Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut. Kerja sama antardaerah tersebut secara spesifik akan mengatur komitmen alokasi anggaran, *tipping fee* pengelolaan sampah, aturan retribusi, mekanisme evaluasi dan pelaporan kinerja, serta pemberian *reward & punishment* bagi kabupaten/kota.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan penelitian mengenai model tata persampahan di Metropolitan Banjarbakula, peneliti merekomendasikan beberapa strategi untuk mengatasi persoalan kelembagaan dalam pengelolaan persampahan di Metropolitan Banjarbakula, antara lain: (a) membentuk Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Banjarbakula yang mengadopsi model tata kelola *Network Administrative Organization* dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang melintasi batas yurisdiksi dan menciptakan sinergitas tujuan organisasi lokal dengan tujuan jaringan yang lebih luas. Badan ini akan berperan mengelola dan mengoordinatori kolaborasi antar-*stakeholder* dalam pengelolaan persampahan di Metropolitan Banjarbakula; dan (b) mengembangkan kerja sama antardaerah di Metropolitan Banjarbakula yang meliputi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut. Kerja sama antardaerah dalam pengelolaan persampahan tersebut diatur dalam sebuah dokumen PKS yang memuat poin-poin kunci terkait komitmen alokasi anggaran, *tipping fee* pengelolaan sampah, aturan retribusi, mekanisme evaluasi dan pelaporan kinerja, serta pemberian *reward & punishment* bagi kabupaten/kota

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dr. Ir. Denny Zulkaidi, MUP atas bimbingan dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan artikel ini. Apresiasi juga disampaikan kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang memberikan dukungan beasiswa bagi penulis dalam pendidikan Magister Perencanaan Wilayah dan Kota di Institut Teknologi Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

Abrain, Taufik. 2018. "Actor Relations in Interregional Cooperation Policy Dynamics Case Study: The Banjar Bakula Metropolitan Area Development Program in South Kalimantan Province." *Policy & Governance Review* 2 (2): 115. doi:10.30589/pgr.v2i2.90.

- Abubakar, Ismaila Rimi, Khandoker M. Maniruzzaman, Umar Lawal Dano, Faez S. AlShihri, Maher S. AlShammari, Sayed Mohammed S. Ahmed, Wadee Ahmed Ghanem Al-Gehlani, and Tareq I. Alrawaf. 2022. "Environmental Sustainability Impacts of Solid Waste Management Practices in the Global South." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19 (19). doi:10.3390/ijerph191912717.
- Ain, K. Q., M. A. Nasri, M. N. Alamsyah, M. D.R. Pratama, and T. Kurniawan. 2021. "Collaborative Governance in Managing Plastic Waste in Bali." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 905 (1). doi:10.1088/1755-1315/905/1/012115.
- Cruz, Nuno F. da, Philipp Rode, and Michael McQuarrie. 2019. "New Urban Governance: A Review of Current Themes and Future Priorities." *Journal of Urban Affairs* 41 (1). Routledge: 1–19. doi:10.1080/07352166.2018.1499416.
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan. (2025). Laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Banjarbaru: DLH Provinsi Kalimantan Selatan.
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan. (2024). Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (DIKPLHD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Gjaltema, Jonna, Robbert Biesbroek, and Katrien Termeer. 2020. "From Government to Governance...to Meta-Governance: A Systematic Literature Review." *Public Management Review* 22 (12). Routledge: 1760–80. doi:10.1080/14719037.2019.1648697.
- Gregorio, Monica Di, Leandra Fatorelli, Jouni Paavola, Bruno Locatelli, Emilia Pramova, Dodik Ridho Nurrochmat, Peter H. May, Maria Brockhaus, Intan Maya Sari, and Sonya Dyah Kusumadewi. 2019. "Multi-Level Governance and Power in Climate Change Policy Networks." *Global Environmental Change* 54 (April 2018). Elsevier Ltd: 64–77. doi:10.1016/j.gloenvcha.2018.10.003.
- Irawanto. 2019. "Kerjasama Antar Daerah Dalam Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Di Kawasan Banjar Bakula Provinsi Kalimantan Selatan." *Jurnal Public Policy* 2 (2): 143–51. doi:10.35308/jpp.v2i2.762.
- Jones, Stephen. 2020. "Waste Management in Australia Is an Environmental Crisis: What Needs to Change so Adaptive Governance Can Help?" *Sustainability (Switzerland)* 12 (21): 1–17. doi:10.3390/su12219212.
- KalimantanPost.com. 2025. "DLH Kalsel Kwatir Operator TPA Regional Banjarbakula Kewalahan Dan Terjadi Open Dumping." <https://kalimantanpost.com/2025/02/dlh-kalsel-kuatir-operator-tpa-regional-banjarbakula-kewalahan-dan-terjadi-open-dumping/>.
- Kementerian Sekretariat Negara. n.d. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, Dan Tanah Laut*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 175.
- Klijn, Erik Hans, Joop Koppenjan, Wouter Spekkink, and Rianne Warsen. 2017. *Governance Networks in Politics*. Routledge. doi:10.1007/978-3-319-50386-8_4.
- Liu, Yixin, and Chao Tan. 2023. "The Effectiveness of Network Administrative Organizations in Governing Interjurisdictional Natural Resources." *Public Administration* 101 (3): 932–52. doi:10.1111/padm.12834.
- LPPL Abdi Persada. 2025. "Terima 360 Ton Sampah Per Hari, TPA Banjarbakula Akui Kekurangan Alat." <https://abdipersadafm.co.id/2025/02/28/terima-360-ton-sampah-per-hari-tpa-banjarbakula-akui-kekurangan-alat/>.

- Maron, Asa, and Avishai Benish. 2022. "Power and Conflict in Network Governance: Exclusive and Inclusive Forms of Network Administrative Organizations." *Public Management Review* 24 (11). Routledge: 1758–78. doi:10.1080/14719037.2021.1930121.
- Maylana, Fitria Rizky, Idiannoor Mahyudin, Hafizianor Hafizianor, and Irma Febrianty. 2024. "Analisis Sisa Umur Pakai Tpa Regional Banjarkakula Tanpa Diterapkannya Upaya Pemilahan Sampah Residu." *EnviroScienteeae* 20 (3): 253. doi:10.20527/es.v20i3.20262.
- Nguyen Long, Le Anh, and Rachel M. Krause. 2021. "Managing Policy-Making in the Local Climate Governance Landscape: The Role of Network Administrative Organizations and Member Cities." *Public Administration* 99 (1): 23–39. doi:10.1111/padm.12684.
- Pahl-Wostl, Claudia. 2019. "Governance of the Water-Energy-Food Security Nexus: A Multi-Level Coordination Challenge." *Environmental Science and Policy* 92 (August 2017). Elsevier: 356–67. doi:10.1016/j.envsci.2017.07.017.
- Provan, Keith G., and Patrick Kenis. 2008. "Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness." *Journal of Public Administration Research and Theory* 18 (2): 229–52. doi:10.1093/jopart/mum015.
- Rini, Jati Puspita, Ely Sufianti, and Sait Abdullah. 2021. "Collaborative Governance Model Integrated Waste Management in Bandung City." *Proceedings of the 2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)* 564 (Icas 2020): 227–31. doi:10.2991/assehr.k.210629.043.
- Said, Sugito, Sarifa Nur, and Isra Jairina. 2024. "Pengaruh Fasilitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Teman Bus Di Wilayah Banjarkakula Tahun 2024." *Online Repository of Universitas NU Kalimantan Selatan*, 1–11.
- Saz-Carranza, Angel, Susanna Salvador Iborra, and Adrià Albareda. 2015. "The Power Dynamics of Mandated Network Administrative Organizations." *Public Administration Review* 76 (3): 449–62. doi:10.1111/puar.12445.The.
- Song, Wenxuan, Ehsan Elahi, Guisheng Hou, and Pengmin Wang. 2025. "Collaborative Governance for Urban Waste Management: A Case Study Using Evolutionary Game Theory." *Sustainable Cities and Society* 126 (March). Elsevier Ltd: 106380. doi:10.1016/j.scs.2025.106380.
- Ulibarri, Nicola, and Tyler A. Scott. 2017. "Linking Network Structure to Collaborative Governance." *Journal of Public Administration Research and Theory* 27 (1): 163–81. doi:10.1093/jopart/muw041.
- Umar, Said, and Muhammad Busyairi. 2023. "Analisis Kebutuhan Air Bersih Kota Banjarbaru Dengan." *Jurnal Teknologi Lingkungan Universitas Mulawarman* 7 (2): 11–19.
- Valentina, Tengku Rika, Roni Ekha Putera, Lubna Salsabila, and Andre Gunawan. 2025. "Waste Management Crisis and Collaborative Governance in Indonesia: Enhancing Public Participation for Effective Urban Waste Solutions." In *Proceedings of the 9th International Conference on Indonesian Social and Political Enquiries (ICISPE 2024), Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 215–26. Atlantis Press SARL. doi:10.2991/978-2-38476-436-5_19.
- Vardopoulos, Ioannis, Ioannis Konstantopoulos, Antonis A. Zorpas, Lionel Limousy, Simona Bennici, Vassilis J. Inglezakis, and Irene Voukkali. 2021. "Sustainable Metropolitan Areas Perspectives through Assessment of the Existing Waste Management Strategies." *Environmental Science and Pollution Research* 28. Environmental Science and Pollution Research: 24305–20. doi:10.1007/s11356-020-07930-1.

- Wang, Huanming, and Bing Ran. 2023. "Network Governance and Collaborative Governance: A Thematic Analysis on Their Similarities, Differences, and Entanglements." *Public Management Review* 25 (6). Routledge: 1187–1211. doi:10.1080/14719037.2021.2011389.
- Yam, Jim Hoy. 2024. "Kajian Penelitian: Tinjauan Literatur Sebagai Metode Penelitian." *Jurnal Empire* 4 (1): 61–70.